

# Sanksi Rekomendasi BPK Ancam SKPD

**MEMPAWAH.** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya berwenang mengaudit keuangan pemerintah. BPK juga berwenang memberi rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja satuan kerja.

Ketua Komisi A, Susanto mengingatkan agar Bupati Pontianak melaksanakan rekomendasi BPK atas kinerja jajarannya. "Berangkat dari fungsi yang melekat pada BPK tentang penilaian terhadap kinerja SKPD, bupati hendaknya melaksanakan rekomendasi BPK dengan sebaik mungkin. Toh, rekomendasi semata-mata

untuk meningkatkan kinerja SKPD itu sendiri," kata Susanto kepada Equator, Senin (22/8).

Menurut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu, rekomendasi diberikan berdasarkan kriteria yang riil dan objektif. Salah satunya kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan. "Bupati jangan ragu dalam menerapkan kebijakan evaluasi terhadap kinerja SKPD nya. Karena, kebijakan evaluasi yang dilakukan bupati akan memberikan motivasi kepada SKPD lain agar bekerja dengan baik dan maksimal," pendapatnya.

Lebih dari itu, Legislati PDI

Perjuangan ini menilai, rekomendasi BPK itu merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak.

"Apalagi beberapa waktu lalu, bupati sendiri telah memberikan skor atau penilaian terhadap jajarannya. Dengan adanya rekomendasi BPK ini, semakin memantapkan evaluasi kinerja pemerintahan daerah ini kedepan," tuturnya.

Susanto mencontohkan, jika ada salah satu kepala SKPD yang tidak mampu melaksanakan tanggungjawab yang

diberikan, mesti tidak perlu dipertahankan. Bupati disarankan mengganti dengan yang lain.

"Bupati perlu secepatnya melakukan evaluasi, dan melaksanakan rekomendasi BPK tersebut. Sebab, masalah ini berkaitan dengan substansi kinerja. Terkait sanksi, tinggal disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, apakah bersifat ringan, sedang atau berat," ujarnya.

Ditanya SKPD mana saja yang mendapatkan rekomendasi BPK, Susanto, enggan mengungkapkan. Dia memastikan ada beberapa SKPD yang mendapatkan rekomendasi BPK tetapi

belum ditindaklanjuti bupati.

"Yang pasti ada beberapa SKPD yang selama ini diberikan rekomendasi BPK, namun tetap mendapatkan jabatan. Kita mempertanyakan mengapa rekomendasi BPK itu sudah dikeluarkan, lantas SKPD belum juga diberikan sanksi," sesalnya.

"Harusnya bupati tidak usah takut, khawatir dan ragu untuk melaksanakan rekomendasi dari BPK tersebut. Sebab rekomendasi BPK itu sendiri berkaitan dengan peningkatan kinerja SKPD terhadap pelayanan publik," tukasnya. (hry)